

# HUBUNGAN PILKADA SERENTAK DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan)

Oleh

**Florianus Aser**

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

E-mail: [florianusaser@gmail.com](mailto:florianusaser@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Development planning is the early dimensions in government management, that very much determined the success development itself. As a road map to the purpose of national achievement, it takes a synergy between all components of central and regional governments. This is to keep sustainability and relations between the central level and regional level planning. Along with the spirit to implement simultaneously election resulting in election, President election, regional election or the village election simultaneously on one the same time then be a momentum to make changes in regional development planning by regional thinking. This provides space for local participation to determine the future direction of their region that will accommodated in national development planning document with the time, the target and shared vision system. Through the new planning with the regional logical thinking can be directly touch on the community needs so the development more focused on their regional live level.*

**Keywords:** *synergetic, planning, simultaneously election, and regional logic thinking.*

## **ABSTRAK**

Perencanaan pembangunan merupakan dimensi awal dalam manajemen pemerintahan, yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Sebagai peta jalan menuju tercapainya tujuan nasional bangsa, maka dibutuhkan sinergitas antara semua komponen baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan dan hubungan yang selaras antara perencanaan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Seiring dengan adanya semangat untuk melaksanakan pilkada serentak yang berujung pada pemilu, pilpres, pilkada dan pilkades secara serentak pada satu waktu yang bersamaan maka menjadi momentum untuk melakukan perubahan pola perencanaan pembangunan dengan logika kewilayahan. Hal ini memberikan ruang partisipasi bagi daerah menentukan arah masa depan daerahnya yang nantinya diakomodasi dalam satu dokumen pembangunan nasional dengan sistem waktu dan target serta visi yang sama. Semua akan tersinergi dalam satu dokumen perencanaan nasional. Melalui perencanaan yang baru dengan logika kewilayahan maka akan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan lebih terfokus pada kehidupan di tingkat daerah.

**Kata kunci:** sinergitas, perencanaan, pilkada serentak dan logika kewilayahan

## PENDAHULUAN

Sistem perencanaan pembangunan suatu negara biasanya sejalan dengan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Pada negara berbentuk federalis, sistem perencanaan pembangunannya cenderung bersifat *bottom up*, karena sumber kekuasaan dan sumber keuangannya berada di tangan pemerintah negara bagian. Selanjutnya pada negara unitaris, sistem perencanaan pembangunannya cenderung bersifat *top down* karena memang di negara unitaris sumber kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Namun pada negara unitaris yang berdesentralisasi sistem perencanaan pembangunannya bersifat eklektif yakni perpaduan antara *top down* dengan *bottom up* dengan gradasi yang bervariasi, tergantung pada derajat desentralisasinya.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan telah mengalami dinamikanya seiring dengan perkembangan dan perubahan situasi politik nasional pada rezim tertentu. Pada masa awal kemerdekaan sampai masa orde lama kegiatan perencanaan pembangunan nasional belum terangkum dalam suatu proses yang tersistem secara baku. Hal ini dipengaruhi oleh konsolidasi politik nasional yang merupakan masa transisi kekuasaan, sehingga dinamika politik yang berkembang sangat pesat dan mewarnai kehidupan bangsa. Akibatnya instabilitas di daerah maupun pusat sehingga sangat sulit mengembangkan model perencanaan pembangunan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Sistem perencanaan pembangunan pada masa orde baru, sudah mulai dikembangkan dalam model tertentu dan telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa ini sistem pemerintahan yang dikembangkan sangat sentralistik dan represif. Dampaknya sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, politik dan termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada masa ini lebih dikembangkan sistem perencanaan bersifat *top down*. Sistem ini diperkuat dengan dominasi perencanaan pembangunan sektoral yang berasal dari organ pemerintah pusat (kementerian/lembaga).

Sehingga yang terjadi pada masa orde baru kegiatan perencanaan pembangunan sampai pada pelosok merupakan suatu dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah pusat. Kalaupun ada proses untuk melibatkan masukan dari daerah atau pemerintahan lokal, sifatnya hanya seremonial dan terkesan manipulatif. Dapat dikatakan Perencanaan pembangunan yang datang dari pemerintahan subnasional hanya bersifat pelengkap saja. Model ini bertahan cukup lama, selama rezim orde baru berkuasa.

Setelah gerakan reformasi pemerintahan tahun 1998, yang menumbangkan rezim orde baru, bandul sistem pemerintahan Indonesia beralih dari sistem sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralistik dengan otonomi seluas-luasnya.<sup>1</sup> Banyak hal mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan dimana peran pemerintah daerah diperkuat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Sisi lainnya pemerintah pusat tidak lagi menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan di daerah. Daerah-daerah mulai berani menjalankan pembangunannya dengan semangat inovasi dan otonomi daerahnya. Akibat tuntutan daerah dalam semangat reformasi tersebut maka lahir beberapa regulasi yang mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan pada masa reformasi ini ditemukan adanya ketidaksinkronan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya sudah sangat desentralistik, tetapi sistem perencanaan pembangunannya masih sangat sentralistik dengan dominasi sektor, meskipun peran daerah sudah lebih besar dibanding masa orde baru. Ini menunjukkan bahwa kepentingan pemerintah pusat masih sangat besar dalam konteks politik perencanaan. Padahal peran pemerintah pusat seharusnya lebih kepada merumuskan visi dan misi bangsa yang harus dicapai dengan model perencanaan pembangunan nasional saja.

---

1 Lihat UUD 1945, terutama Pasal 18

Sehingga menjadi rujukan bagi daerah ketika akan merencanakan pembangunannya.

Kenyataan yang terjadi masing-masing daerah membuat perencanaannya sendiri berdasarkan visi dan misi kepala daerahnya yang sudah pasti tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional. Adapun hal ini masih dijumpai karena belum sinergi antara entitas-entitas yang berperan dalam keberhasilan pembangunan di daerah. Banyak aspek yang belum saling mendukung dalam suatu kesatuan sistem sehingga belum terwujud keselarasan dalam pembangunan tersebut. Beberapa aspek yang belum sinkron tersebut dapat dipaparkan misalnya hubungan antara pemilihan kepala daerah dengan perencanaan pembangunan. Seringkali terjadi pengabaian visi dan misi daerah oleh calon dalam proses kampanye maupun jualan politiknya. Yang dilakukan adalah menampilkan janji politik yang hanya menyenangkan kepentingan sesaat masyarakat sehingga bisa terpilih. Akibatnya ketika yang bersangkutan terpilih dan janji politik dalam visi dan misi yang dipaparkannya ingin di muat dalam RPJMD maka sering terjadi ketidaksesuaian dengan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan bersama.

Aspek lain yang tidak selaras adalah menyangkut penyelenggaraan waktu suksesi kepemimpinan yang berbeda setiap daerah kabupaten/kota dan propinsi maupun nasional. Hal ini meninggalkan persoalan pelaksanaan sistem pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya, daerah kabupaten/kota dengan daerah propinsi dan juga daerah dengan pusat. Misalnya ketika pusat dan propinsi baru melaksanakan suksesi kepengimpinannya dan baru memulai perencanaan pembangunan jangka menengahnya, di sebagian daerah kabupaten/kota sudah memasuki masa kepengimpinannya dan sementara menjalankan pembangunan berdasarkan perencanaan yang telah jauh ditetapkan sebelumnya. Persoalan ini berlangsung terus menerus setiap tahun setiap periode dan belum ada solusinya.

Selanjutnya mencermati lebih jauh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat dikatakan sangat konseptual dan sistemik

namun belum terealisasi secara konkrit. Salah satu contohnya adalah fakta paradoks antara perkembangan besarnya DAU dengan perkembangan IPM. DAU semakin besar tetapi peringkat IPM nasional masih fluktuatif dan stagnan pada dua tahun belakangan. pada tahun 2011 berada di peringkat 121 kemudian menjadi peringkat 124 pada tahun 2012 dari 187 negara.<sup>2</sup> Selanjutnya Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2015 Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 188 negara dengan besaran 0,684 atau sama dengan tahun sebelumnya. Posisi Indonesia sama dengan Gabon (salah satu negara di Afrika yang merdeka pada 1960).<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa ada yang belum tuntas dan masih tidak konsisten dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Paradoks lainnya yang muncul antara lain Indonesia menjadi pengimpor beras padahal merupakan negara agraris dengan penduduk nomor 4 (empat) di dunia serta memiliki lahan yang luas dan subur (1.904.569 km<sup>2</sup> atau peringkat 15 dunia). pada bagian lain Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan panjang pantai nomor dua terpanjang di dunia<sup>4</sup> masih menjadi pengimpor garam dan ikan asin. pada sisi lain, ekspor ikan hias, rumput laut, mutiara laut masih sangat kecil dibanding negara lain. Kemudian catatan paradoks berikutnya adalah Indonesia masih menjadi pengimpor bahan bakar fosil sebagai sumber energi, padahal banyak sekali sumber energi terbarukan lainnya yang luar biasanya besarnya seperti matahari, gelombang air laut, angin dlsb. Indonesia sama sekali tidak masuk dalam kategori negara

2 [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_Indeks_Pembangunan_Manusia)

3 [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/16/154600626/Indeks\\_Pembangunan.Manusia.Indonesia.Stagnan](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/16/154600626/Indeks_Pembangunan.Manusia.Indonesia.Stagnan).

4 Lihat The World Factbook, diunduh dari [en.wikipedia.org/wiki/list\\_of\\_countries\\_by\\_length\\_of\\_coastline](http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_length_of_coastline) dengan panjang pantai 1.811.569 km<sup>2</sup> atau luasnya 54.716 km<sup>2</sup>)

yang mengembangkan sumber energi matahari (*photovoltaic power*).

Fakta lainnya yang juga sangat paradoks adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang dianggap paling stabil di kawasan Asia tetapi menurut data beberapa ekonom hal tersebut layaknya gedung pencakar langit yang keropos. Pertumbuhan yang kerap kali diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP), telah mengalami penguatan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir namun hal tersebut tidak berkorelasi terhadap pengentasan masyarakat miskin, dengan kata lain yaitu sebagian besar manfaat yang ada hanya dinikmati oleh kalangan elit<sup>5</sup>. pada kuartal pertama tahun 2016 ini misalnya, Bank (BI) memprediksi pertumbuhan akan mencapai kisaran 5,1% hingga 5,2%.<sup>6</sup> Akselerasi pertumbuhan tersebut semata-mata didorong oleh belanja pemerintah, hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Moneter Bank, Junda Agung yang menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan belanja modal pada kuartal I 2016 hingga mencapai 161% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain peningkatan pengeluaran infrastruktur pemerintah, akselerasi serupa juga terjadi pada belanja barang yang mencapai 56% pada kuartal I 2016.

Sementara itu, menurut data dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kemiskinan absolut di menunjukkan penurunan di tiap tahunnya. Kemiskinan absolut pada tahun 2010 sebesar 31.000.000, pada tahun 2011 menurun menjadi 30.000.000, hingga pada tahun 2014 menurun kembali menjadi 28.000.000. Begitu pula dengan data kemiskinan relatif yang menunjukkan tren penurunan di tiap tahunnya, persentase angka kemiskinan relatif di pada tahun 2010 hingga 2015 secara berturut-turut adalah 13,3%, 12,5%, 11,7%, 11,5%, 11%, dan pada bulan

September 2015 meningkat tipis sebesar 11,31%. Disisi lain hal tersebut sangat berbeda halnya dengan besaran koefisien gini/rasio gini dalam lima tahun terakhir sejak 2010 sampai 2015, yaitu 0,38; 0,41; 0,41; 0,41; 0,41; dan 0,40.<sup>7</sup> Peningkatan koefisien gini/rasio gini tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian PDB yang tinggi ternyata masih belum mampu menangkap dan menggambarkan fenomena penting bagi kualitas hidup rakyat. Inilah ironis yang muncul terhadap pandangan stabilnya pertumbuhan di ibaratnya seperti gedung pencakar langit yang terlihat tinggi namun sebenarnya tak lebih daripada sekadar menara yang keropos. Meski pencapaian PDB angkanya terlihat gemuk, namun sedikit banyak masih belum merepresentasikan aspek distribusi kesejahteraan rakyat.

Kemudian dari sisi Kesejahteraan Sosial, fakta menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan warga pedesaan yang menganggur atau mungkin hanya berprofesi sebagai petani desa, semenetara itu di sisi lain terdapat segelintir masyarakat kota yang menikmati fasilitas modernisasi dengan berbagai surga belanja yang megah terpampang di tiap sudut perkotaan. Budaya konsumerisme tumbuh dengan subur seiring merambatnya kapitalisme di masyarakat. Realita tersebut membuktikan bahwa pencapaian pertumbuhan yang menguat dalam 15 tahun terakhir ini, semata-mata manfaatnya lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sedangkan sekitar 80% penduduk sisanya atau lebih dari 205.000.000 orang masih jauh tertinggal di belakang. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur.<sup>8</sup> Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang terlalu tinggi yang bisa berdampak buruk

5 Meluasnya ketimpangan Indonesia <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>

6 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/21/170000826/BI.Pertumbuhan.Ekonomi.RI.Kuartal.I.2016.5.1.Sampai.5.2.Persen>

7 <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/05/22/paradoks-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>

8 Meluasnya ketimpangan Indonesia <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>

pada pertumbuhan, memperlambat pengentasan kemiskinan dan melemahkan kerukunan sosial. Ketika masyarakat menyadari adanya jurang pendapatan dan kekayaan, maka potensi ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi sehingga dapat menimbulkan konflik sosial.

Kondisional di atas menunjukkan adanya perilaku dalam pembangunan yang harus diperhatikan secara seksama. Orientasi manajemen pemerintahan harus diubah dari mulai sasaran kewilayahan yang lebih partisipatif dan akomodatif ketimbang *top down* yang sifatnya memaksa dan manipulatif tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERUBAHAN PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan pemahaman perencanaan pembangunan suatu negara sejalan dengan bentuk negaranya, maka argumentasi ini juga menjadi landasan melihat perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks itu bentuk negara Indonesia adalah unitaris, sehingga sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikembangkan selalu didominasi oleh peran pemerintah pusat, meskipun dominasinya bergradasi dari waktu ke waktu.

Seiring dengan dinamika sosial politik yang berkembang di tingkat lokal dan nasional maka terjadi perubahan pada sistem ketatanegaraan dan model penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal tersebut berdampak pada perubahan kebijakan dan juga penyesuaian lainnya termasuk fundamental dalam konstitusi. Sesuai perintah konstitusi agar diselenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, oleh karena itu model perencanaan pembangunan pun sudah sewajarnya perlu dirintis pemikiran untuk menyelaraskan dengan sistem pemerintahan yang desentralistik.

Perubahan paradigma yang dimaksud adalah dari perencanaan sektoral ke perencanaan kewilayahan. Perencanaan sektoral yang selama

ini dikembangkan menghasilkan ego-sektoral dan tidak memperhatikan pembangunan yang berkesinambungan. Setiap bidang memiliki program sendiri-sendiri merencanakan pembangunan yang digulirkan sampai ke pelosok dengan kepentingannya yang berbeda. Oleh karena itu sudah saatnya dipikirkan alternatif perencanaan dengan model kewilayahan yang sesuai dengan sistem pemerintahan desentralistik yang dikembangkan.

Paradigma kewilayahan (*regionalism*) sebenarnya bukan sesuatu yang baru di negara lain, tetapi menjadi hal baru untuk digagas dan diterapkan di Indonesia. Namun melihat keberhasilan model ini pada implementasi di negara lain maka sudah saatnya dipikirkan dan dikembangkan di Indonesia. Semangat ini membutuhkan kemauan politik dari semua *stakeholders* bangsa dari pusat sampai daerah. Hal ini dapat terjadi manakala kepentingan politik pragmatis dari rezim maupun partai politik yang berkuasa dikurangi.

Konsep *regionalisme* dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang politik, *regionalisme* diartikan sebagai: “*development of a political or social system based on one or more such areas*”.<sup>9</sup> Dari sudut pandang pemerintahan, *regionalism* diartikan sebagai: “*the principle or system of dividing a city, state, etc, into separate administrative regions*”.<sup>10</sup> Selanjutnya dalam *Restructuring Local Government* mengenai regionalism yaitu sebagai berikut: “*- - -. However, the political fragmentation of the metropolitan area makes it difficult to address economic development, service provision or democratic voice of the regional level. Consolidation argue that regional government is the solution*” - - -”.<sup>11</sup> Pemahaman lain oleh AWRPC (Association of Wisconsin Regional Planning Commissions) mengemukakan bahwa: “*The need for regionalism or areawide*

9 [www.merriam-webster.com/dictionary/regionalism](http://www.merriam-webster.com/dictionary/regionalism)

10 [dictionary.reference.com/browse/regionalism](http://dictionary.reference.com/browse/regionalism)

11 [http://government.cce.edu/doc/viewpage\\_r.asp?ID=Intermunicipal\\_Cooperation](http://government.cce.edu/doc/viewpage_r.asp?ID=Intermunicipal_Cooperation)

*planning and coordination in a number of related challenges in metropolitan areas, with parallels in the more rural regions within the state”.*

Dari beberapa pemikiran *regionalisme* yang dikemukakan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan model perencanaan pembangunan kewilayahan. Pengembangan model ini diharapkan menjadi solusi terhadap tarik menarik titik berat otonomi antara provinsi dengan kabupaten/kota. dengan sistem ini, isi otonomi daerah provinsi dikurangi tetapi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diperkuat.

Adapun model perencanaan kewilayahan dimaksud adalah Gubernur diberi peran sebagai “*budget optimizer*” dengan mengkoordinasikan seluruh perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayahnya untuk dibahas dengan DPR RI dan para menteri/pimpinan lembaga. dengan demikian tidak ada program pembangunan dari pemerintah pusat yang langsung ke kabupaten/kota tanpa melalui gubernur. Agar konsisten dilaksanakan dan memberikan kejelasan para pihak yang terlibat dalam perencanaan maka perlu dibuat SOP. dengan demikian mekanisme yang baru tersebut tidak menimbulkan rantai birokrasi yang lebih panjang, yang justru menghambat pembangunan.

Perubahan model ini berdampak pada perubahan peran gubernur yang lebih menonjol sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu mekanisme pengisian jabatan gubernur juga perlu diubah dengan melibatkan presiden pada saat seleksi sebelum dipilih oleh DPRD ataupun oleh rakyat. dengan demikian entitas pengisian jabatan kepala daerah provinsi merupakan gabungan antara pemilihan dan pengangkatan.

Dari analisa yang dilakukan terhadap konsep model perencanaan berbasis kewilayahan dapat ditemukan beberapa keuntungan maupun kelemahan. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### ► **Keunggulan**

1. Memberi peran lebih besar dan memperkuat kedudukan gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat untuk memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan kemajuan daerahnya.

2. Memperpendek jenjang pembinaan, pengawasan dan koordinasi sehingga diharapkan penyelenggaraan pembangunan lebih efektif dan efisien.
3. Pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daerah.
4. Mempermudah inventarisasi kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah untuk dapat diatasi melalui perencanaan pembangunan.
5. Memperkuat solidaritas daerah dengan kerjasama saling menguntungkan antar daerah.

#### ► **Kelemahan**

1. Dapat memperbesar sikap fanatisme regional, yang mengarah pada separatisme, apabila tidak ada pembinaan dan pengawasan yang memadai dari pemerintah pusat.
2. Sulit untuk dilaksanakan karena adanya penolakan dari kelompok sektoral yang selama ini sudah terbiasa memegang dominasi perencanaan pembangunan nasional.
3. Memerlukan dukungan SDM yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan regional, yang belum tentu tersedia pada masing-masing daerah provinsi.
4. Dapat menimbulkan kesenjangan antar regional apabila potensi SDM dan SDA tidak berimbang, serta tidak disertai pendampingan yang proporsional dari pemerintah pusat.

### **KORELASI ANTARA PILKADA SERENTAK DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Perubahan sistem perencanaan sebagaimana dikemukakan di atas hanya dapat dilaksanakan apabila ada keselarasan mengenai dimensi waktu. Oleh karena itu ada gagasan mengadakan

pemilihan umum nasional, pemilihan umum daerah, dan pemilihan kepala desa secara serentak yang dilaksanakan secara bertahap. dengan adanya pergantian pimpinan daerah dan pimpinan nasional pada waktu yang bersamaan maka proses politik tersebut difokuskan hanya pada satu masa tertentu. dengan demikian selanjutnya secara bersama-sama pula akan meneruskan sistem pembangunan yang dimulai dengan perencanaan secara sinergi. Karena memang semuanya dimulai dengan kondisional yang sama.

Ada beberapa simulasi waktu pemilihan kepala daerah serentak yang saat ini bertahap pada beberapa daerah yang diharapkan suatu saat terjadi secara serentak secara nasional. pada tahun 2019 akan diadakan pemilu nasional secara serentak, dengan memilih anggota DPR, DPD, Presiden/ Wakil Presiden secara bersamaan. Selanjutnya pada tahun 2020 akan diadakan pemilu daerah secara serentak dengan memilih gubernur, anggota DPRD Provinsi, bupati/walikota, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak. Tetapi konsep ini diundur pelaksanaannya pada tahun 2025, dengan didahului pilkada serentak tahap pertama tahun 2015, diikuti dengan pilkada serentak tahap kedua tahun 2020, dan pilkada

serentak tahun 2025. Melalui pilkada serentak secara nasional yang diselenggarakan sesudah pemilu nasional, akan diperoleh keselarasan perencanaan pembangunan dari dimensi waktu, yakni perencanaan pembangunan daerah disusun satu tahun setelah perencanaan pembangunan nasional, dan berakhir satu tahun setelah perencanaan pembangunan lima tahunan tingkat nasional selesai.

Dilihat dari dimensi isi, direncanakan akan disusun semacam GBHN yang berisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan jangka menengah, dengan memadukan konsep pembangunan yang disiapkan oleh MPR-RI dan visi, misi Presiden. Kemudian Presiden mendistribusikan perencanaan pembangunan nasional menurut masing-masing provinsi yang kemudian akan diselaraskan dengan visi dan misi gubernur terpilih. Hal yang sama dilakukan oleh gubernur terpilih untuk perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Dengan demikian model pemilihan kepala daerah serentak diharapkan berdampak pada keselarasan perencanaan pembangunan baik dari dimensi isi maupun waktu antara pusat dan daerah.



**Gambar 1.**  
**Model Penyelarasan Waktu dan Isi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah**  
 (Diadaptasi dari pemikiran Sadu Wasistiono, 2016)

## **SIMPULAN**

Jika dicermati secara mendalam, Suksesi kepemimpinan ditingkat lokal memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu diperhatikan sistem perencanaannya. Sistem perencanaan sesungguhnya harus tersistem dan bersinergi antar daerah dan pusat. Pemahaman ini mengingat implementasi visi dan misi serta janji politik kepala daerah yang terpilih akan diwujudkan secara berjenjang dalam jangka

pendek dan jangka menengah. Hal tersebut akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan pilkada serentak merupakan momentum untuk mewujudkan perencanaan yang bersinergi. Namun yang harus diperhatikan adalah konsistensi pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh dominasi politik rezim yang berkuasa. dengan adanya pilkada serentak maka ada kesamaan waktu dalam proses perencanaan pembangunannya sehingga hal itu bisa disesuaikan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, termasuk antar daerah dengan propinsi maupun pusat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Wasistiono, Sadu, 2015, *Kaitan Antara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan*, Bahan FGD di Bappeda Provinsi Jawa Barat Tanggal 28 Oktober 2015
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- The World Factbook, diunduh dari [en.wikipedia.org/wiki/list\\_of\\_countries\\_by\\_length\\_of\\_coastline](http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_length_of_coastline) dengan panjang pantai 1.811.569 km2 atau luasnya 54.716 km2)
- [www.merriam-webster.com/dictionary/regionalism](http://www.merriam-webster.com/dictionary/regionalism)
- [dictionary.reference.com/browse/regionalism](http://dictionary.reference.com/browse/regionalism)
- [http://government.cce.edu/doc/viewpage\\_r.asp?ID=Intermunicipal\\_Cooperation](http://government.cce.edu/doc/viewpage_r.asp?ID=Intermunicipal_Cooperation)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_Indeks\\_Pembangunan\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_Indeks_Pembangunan_Manusia)
- <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/05/22/paradoks-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>
- Meluasnya ketimpangan Indonesia, <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/21/170000826/BI.Pertumbuhan.Ekonomi.RI.Kuartal.I.2016.5.1.Sampai.5.2.Persen>